

REFORMASI GEREJA INGGRIS 1529-1534: “AMBISI DAN KEWAJIBAN RAJA HENRY VIII”

Oleh :

Pipit Maysyaroh dan Nana Supriatna¹

ABSTRACT

This research entitled “Church Reform in England in 1529-1534: A Study of the Background of Establishment of Anglican Church in Britain”. The difference in characteristics of church reform in England is the background of this research. There are four main questions of research: (1) What was the situation of the Church of England before the Church Reform of 1534? (2) What were the factors of the Church’s Reformation in England in 1534? (3) How was the process of secession of the Church of England from the Roman Church in the Church Reformation of England in 1534? (4) How was the impact of the Church Reformation in England in 1534? The main purpose of this research is to describe about what happened during the Church Reformation process in Britain which took place in 1534. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography. Based on research results, it was found that, one, the church situation in England is very bad. Corruption, demoralization, and veneration of relics become a culture. Two, Clement VII’s refusal to annul the marriage of King Henry VIII was the trigger of secession. Three, the process of separation is done through the Reform Parliament. The Act of Supremacy makes him the sole ruler of the Kingdom of England and Anglican Church. Four, the greatest impact was the religious crisis that occurred along the Tudor Dynasty, and the Kingdom of England became a country with complete sovereignty.

Keywords: King Henry VIII, Tudor Dynasty, Reformation of Church, Anglican Church, Roman Church

PENDAHULUAN

Dinasti Tudor merupakan sebuah dinasti yang berkuasa di Kerajaan Inggris yang memerintah pada abad ke 16 yang merupakan masa yang disebut sebagai jalan keluar dari Abad Pertengahan menuju masa yang modern dengan pintu

Humanisme dan Renaissance. Dinasti ini dikenal dengan para pemimpinnya yang berwatak berani, keras dan bertekad tinggi. Selain itu dinasti ini dikenal dengan permasalahan agama yang terjadi hampir disepanjang kekuasaannya saat menduduki

¹ Pipit Maysyaroh adalah mahasiswa pada Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Nana Supriatna adalah dosen pembimbing I. Penulis dapat dihubungi pada nomor 085624784434

tahta Kerajaan Inggris. Eksistensi Dinasti Tudor terjadi bersamaan dengan gelombang reformasi agama di Eropa Barat pada abad ke-16. Abad ke-16 merupakan abad yang sangat krusial dalam sejarah Eropa. Hal ini disebabkan oleh otoritas mutlak Gereja Roma di Eropa mulai memudar. Pada tahun 1534, Raja Henry VIII memisahkan diri dari Gereja Roma dan melakukan sebuah reformasi dengan membentuk gereja Nasional Anglikan. "The king, not the Pope, was its head. It was a national church, with all foreign control, and interference at an end, and an "estabilish" church, because of its official connection with the government" (Hall, Albion & Pope, 1961, hlm 184). Sedangkan sebelumnya, menurut Minogue (2006, hlm 42), intisari dari politik Abad Pertengahan terletak pada fakta bahwa raja tidak dapat berkuasa (bahkan untuk menentukan perluasan terhadap fungsi-fungsinya yang terbatas sebagai penguasa sebagaimana yang dipahami pada waktu itu) tanpa kerjasama dengan para mitranya. Selama berabad-abad pada Abad Pertengahan kehidupan manusia diatur oleh Tuhan dengan dua macam penguasa yaitu yang bersifat ketuhanan yang dikepalai Paus dan yang bersifat keduniawian yang dikepalai oleh seorang raja. Meskipun terdapat dua unsur didalamnya, tetapi kedua unsur ini bekerja sesuai dengan hukum ketuhanan atau hukum kodrat (Sabine, 1954, hlm 222). Hal ini pun berlaku di Kerajaan Inggris.

Keputusan dari Raja Henry VIII ini menambah daftar negara yang melakukan reformasi gereja di Eropa pada abad ke 16. Seperti apa yang dinyatakan oleh Lucas (1960, hlm 543) bahwa ".....the entire land was led by the royal power from the faith from its fathers, and the Anglican Church,

differing in many respect from Lutheran, Zwinglian, or Anabaptist communions, was established". Gelombang reformasi gereja di Eropa secara garis besar disebabkan oleh Gereja Roma yang mengalami demoralisasi dalam aktifitasnya. Selama berabad-abad gereja dan lembaga kepausan telah melakukan berbagai penyimpangan keagamaan tanpa ada satu kekuatan apapun yang berhasil meluruskan penyimpangan itu (Suhelmi, 2004, hlm 144). "It was reported that some clergymen obtained their position through irregular and fraudulent means. Some clergymen led immoral and scandalous lives" (Okon, 2013, hlm 11). Beberapa petinggi dari gereja diketahui memiliki kehidupan yang jauh dari ajaran gereja yang sesungguhnya. Menurut Lyon dkk (1972, hlm 381) "during the fourteenth and fifteenth centuries Latin Christendom slipped into spiritual and moral degeneration. The defeats and insults were a clear indication that the Papacy and church has lost prestige and power. In the eye of Western Eourop the Papacy lost its independence". Reformasi Gereja di Inggris dapat dikatakan berbeda dengan Reformasi Gereja lainnya yang terjadi di wilayah Eropa Barat pada saat itu. Apabila Reformasi Gerejayang dipimpin oleh Martin Luther di Jerman, Zwingli di Swiss, John Knox di Skotlandia, atau Calvin di Perancis merupakan reformasi yang doktrinal, maka lain halnya dengan Reformasi Gereja di Inggris. Reformasi Gereja di Inggris lebih banyak mengandung unsur politik dari sang raja sendiri. Raja Henry VIII dengan dibantu oleh tangan kanannya Cromwell dan Cranmer, melakukan langkah politik untuk melepaskan diri dari ikatan Gereja Roma.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode historis atau metode sejarah. Yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2015, hlm 39). Selain itu penulis menggunakan teknik studi literatur dengan membaca dan mengaji buku-buku serta sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti merupakan tahap heuristik. Heuristik adalah suatu tahapan dalam metode sejarah yang berupa tahap mengumpulkan sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat oleh peneliti. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah yang berupa sumber tertulis, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Dengan menggunakan teknik literature, penulis mengumpulkan sumber-sumber atau tulisan yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Beberapa bentuk sumber dalam jenis sumber tertulis dapat dikumpulkan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini, diantaranya buku, skripsi, jurnal, ensiklopedia, dan beberapa buku dalam bentuk e-book.

Tahap selanjutnya yang dilalui oleh peneliti ialah tahap kritik sumber. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan melalui tahapan heuristik. Kritik sumber merupakan tahap dari penelitian yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Abdurahman (2007, hlm 68) menyebutkan beberapa hal yang menjadi acuan dalam melakukan kritik

ekstern. Dimulai dari waktu dan tempat dibuatnya sumber tersebut, penulis atau pembuat sumber tersebut, bahan sumber tersebut, serta bentuk fisik dari sumber tersebut. Melalui kritik internal peneliti harus mampu memutuskan apakah kesaksian tersebut dapat diandalkan (reliable) atau tidak (Sjamsuddin, 2007, hlm 143). Penulis melakukan kritik internal untuk melihat aspek yang ada didalam suatu sumber. Dari tahap kritik internal inilah penulis dapat menilai apakah suatu sumber layak digunakan dalam penelitian atau tidak.

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh penulis. Dalam tahapan ini terdapat tahapan lainnya yaitu interpretasi (penafsiran), eksplanasi (penjelasan) dan eksposisi (penyajian). Dalam proses ini, penulis akan melakukan mencipta ulang dan menafsirkan dari fakta-fakta yang didapat dari hasil kritik sumber. Fakta-fakta tersebut kemudian disambungkan dari satu ke yang lainnya hingga membentuk suatu penafsiran sejarah yang utuh dan berkesinambungan. Pada tahap ini sangat diperlukan bagi penulis untuk memiliki kemampuan analisis. Eksplanasi merupakan tahap yang sangat penting dalam proses historiografi. Berkhofer (dalam Sjamsuddin, 2007, hlm 148) menyatakan bahwa dalam esplanasi mencakup apa yang disebut dengan kausalitas (causation) serta bentuk-bentuk penghubung lain (connections) yang digunakan oleh para sejarawan ketika mereka mensintesis fakta-fakta. Artinya, penulis sejarah harus menyatukan fakta-fakta yang didapat hingga membentuk suatu cerita dari sebuah peristiwa (sintesis). Pada tahap ini penulis akan menggunakan deskripsi dan narasi dalam menuliskan peristiwa-

peristiwa yang dikaji hingga kemudian akan membentuk suatu kesatuan peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain. Tahap eksposisi merupakan tahap dimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sampai hingga pembaca. Seperti yang dijelaskan oleh Sjamsuddin (2007, hlm 185) bahwa dalam penulisan sejarah, wujud dari penulisan (historiografi) itu merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan (eksposisi) yang sampai kepada dan dibaca oleh para pembaca atau pemerhati sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Abad ke-16 M merupakan abad yang sangat krusial dalam sejarah Eropa, terutama Eropa Barat. Gelombang reformasi keagamaan berkembang dengan cepat. Doktrin-doktrin agama mulai terbentuk di beberapa wilayah di Eropa diantaranya Lutheran di Jerman, Zwinglian di Swiss, serta Calvinisme di Perancis. Doktrin-doktrin ini melandasi terjadinya reformasi-reformasi gereja yang terjadi di Eropa. Kerajaan Inggris yang pada awalnya sangat mendukung eksistensi Gereja Roma di Eropa pun tak luput mengalami hal yang sama. Hanya saja, Reformasi Gereja di Inggris berbeda dengan reformasi-reformasi keagamaan yang terjadi di Eropa pada saat itu. Apabila reformasi-reformasi keagamaan selain yang terjadi di Kerajaan Inggris merupakan reformasi yang bersifat doktrinal, lain halnya dengan yang terjadi di Kerajaan Inggris. Child (1890, Hlm. 48) menyatakan bahwa:

“The time at which Henry and Cromwell chose to separate from Rome on grounds which had nothing to do with doctrine, chanced to coincide with that at which oth-

er person elsewhere were doing the same thing for reasons distinctly doctrinal, and at which doctrinal difference with Rome were rising up all over the civilized world.”

Reformasi Gereja di Inggris pada tahun 1529-1534 bukanlah upaya pertama Inggris dalam hal melakukan pergerakan agama, meskipun pergerakan ini belum bisa dikatakan mengarah pada reformasi. Pada abad ke 14, John Wycliffe, seorang guru besar Universitas Oxford menyebarkan ajarannya yang berawal dari mengkritik kehidupan gereja. Ia menolak otoritas Paus, mengkritik kemewahan pada gereja dan kepausan, menolak transubstansiasi, serta menolak pemujaan terhadap orang-orang suci dan peninggalan-peninggalan suci (veneration of relics) (Samekto, 1998, hlm 76). Selain itu, Wycliffe juga berpendapat bahwa yang menjadi patokan agama Kristen ialah Kitab Injil. Bukan hukum ataupun kebiasaan gereja. He would make sure that the essential message of the Bible would break outside the walls of ivy leagues discussion to reach hearts in the villages and countryside (Lensch, 1996, hlm 17). Maka dari itu ia pun menerjemahkan Kitab Injil lengkap dari Bahasa Latin ke dalam Bahasa Inggris. Akan tetapi pergerakan Wycliffe dan para pengikutnya, Lollards, dihentikan oleh pemerintahan Raja Henry VI. Pada abad-abad selanjutnya, kehidupan gereja yang dinilai oleh beberapa orang sebagai aktifitas yang tidak menverminkan kehidupan beragama terus berlangsung.

Keputusan Raja Henry VIII untuk melepaskan diri dari otoritas Gereja Roma merupakan keputusan yang dianggap kontroversial pada saat itu. Hal ini disebabkan karena sebelumnya hubungan antara Kerajaan Inggris dan Gereja Roma sangat baik. Bentuk nyata dari hubungan

antara Inggris dan Gereja Roma yang baik pada masa pemerintahan Raja Henry VIII, diperlihatkan pada pembelaan Raja Henry VIII atas 95 Dalil yang dituduhkan oleh Martin Luther (1483-1546 M) pada pihak Gereja Roma pada masa-masa awal Reformasi Gereja di Eropa Barat. Raja Henry VIII mengeluarkan "Assertion of the Seven Sacraments Against Martin Luther" pada tahun 1521. The Pope received the book with the great joy, pronouncing Luther to be "a most filthy monster", and bestowing upon the author the proud title still borne by the British Sovereign Fidei Defensor, "Defender of the Faith" (Clark, 1897, hlm 68-69). Selain itu otoritas Gereja Roma dalam kehidupan masyarakat Eropa dapat dikatakan otoritas yang mutlak. Selama berabad-abad pada Abad Pertengahan kehidupan manusia diatur oleh Tuhan dengan dua macam penguasa, yaitu yang bersifat ketuhanan yang dikepalai oleh paus, dan yang bersifat keduniawian yang dikepalai oleh seorang raja (Sabine, 1954, hlm 222).

Meskipun secara teori hukum ini memiliki garis batas yang jelas, tetapi dalam prakteknya sulit untuk menentukan batas yang tegas antara otoritas negara dan gereja (Lucas, 1993, hlm 279). Gereja akan ikut mencampuri urusan kenegaraan mengenai kontrol atas kependetaan dalam sebuah negara, perpajakan gereja, masalah perceraian, hingga hal-hal lainnya. Apa yang dikatakan atau eputusan yang diambil oleh Paus merupakan keputusan yang mutlak.

Pemicu dari keputusan Raja Henry VIII untuk memisahkan diri dari otoritas Gereja Roma ialah kebutuhannya untuk memiliki seorang anak laki-laki yang bisa dijadikan sebagai penerus tahta Dinasti Tudor. Sebagai seorang raja dan kepala

sebuah dinasti, Raja Henry VIII memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga dan memelihara keberlangsungan kekuasaannya. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki keturunan yang bisa menggantikannya sebagai seorang pemimpin. Brinton dkk (1960, hlm 471) menyebutkan bahwa, "The House of Tudor had only recently achieved the Crown, and Henry felt more strongly than was usual even in those days that a male heir was essential". Lucas (1960, Hlm. 546) menambahkan bahwa, "Only 35 years ago the Tudor family had been established on the throne, and, since the dangers of a debated succession were vividly in the minds of people, a male heir was considered necessary for reasons of state and dynasty."

Meskipun Raja Henry VIII telah memiliki seorang pewaris perempuan, tetapi pada masa itu, seorang wanita sebagai pemimpin sebuah kerajaan bukanlah hal yang umum. "The succession was endangered by the existence of a legitimate female heir, the princess Mary, and the illegitimate male heir, the Duke of Richmond" (Smith, 1988, hlm 109). Selain itu berdasarkan pengalaman dari Kerajaan Inggris, pemimpin wanita bukanlah pilihan yang baik. Kerajaan Inggris pernah diperintah oleh seorang ratu. Ratu Matilda merupakan puteri dari Raja Henry I dari Dinasti Angevin. Sepeninggal Raja Henry I, Ratu Matilda tidak dapat menguasai para baron dan terjadi perebutan tahta hingga terjadi kekacauan serta peperangan yang dikenal dengan The Anarchy. Hall, Albion & Pope (1961, hlm 181) menyebutkan bahwa, "England's one experience with reigning queen, it must be remembered, had been with the unfortunate Matilda and anarchy". Mary I merupakan putri

Raja Henry VIII dari ratunya, Catherine of Aragon. sayangnya kesehatan Catherine of Aragon tidak mengijinkannya untuk melahirkan anak lagi bagi Raja Henry VIII.

Raja Henry VIII merupakan seorang Katolik yang taat. Sebelum menjadi pewaris tahta, ia merupakan anak kedua yang dipersiapkan untuk mengisi jabatan dalam gereja. Ia tidak mungkin mengangkat anak haramnya Henry Fitzroy, untuk menjadi penerusnya. Akan tetapi ia menemukan celah untuk keluar dari permasalahan tersebut. Isterinya, Cathrine of Aragon merupakan janda dari kakaknya sendiri, Arthur Tudor. Raja Henry VIII meyakini bahwa pernikahannya yang tidak menghasilkan seorang putera sebagai pewaris serta kematian anak-anaknya merupakan hukuman yang diberikan oleh Tuhan karena telah menikahi janda dari kakaknya, Arthur Tudor. Mengingat di dalam ajaran Gereja Roma, menikahi janda dari saudara laki-laki merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. 'Larangan dari Kitab Imamat' dari Kitab Suci yang melarang pernikahan seorang pria dengan janda dari saudara laki-lakinya" (Lewis, 2015, hlm 90). Alasan religius seperti ini dianggapnya akan berhasil untuk menceraikan permaisurinya tersebut. Pada tahun 1527, Raja Henry VIII, dibantu oleh Kardinal Thomas Wolsey, mencoba untuk menekan Catherine of Aragon agar ia mau membatalkan pernikahannya dengan Raja Henry VIII dengan menjauhkannya dengan penerima pengakuan dosanya, yaitu Uskup Fisher Rochester. Kemudian ia mengajukan permintaan dispensasi pada Paus Klemens VII agar ia merestui pembatalan pernikahannya dengan Catherine of Aragon. akan tetapi, Kepausan

di Vatikan pun sedang mengalami kesulitan yang berhubungan dengan keponakan Catherine of Aragon, Kaisar Charles V.

Terdapat dua hal yang dianggap menghalangi Raja Henry VIII menuju keinginannya. Yang pertama, "the law of the church, for marriage was a sacrament and not to be dissolve" (Lucas, 1960, Hlm. 548). Dimata agama, Raja Henry VIII dan Catherine of Aragon merupakan pasangan yang resmi menikah. Pernikahan merupakan salah satu aspek dalam Tujuh Sakramen. Aspek dalam Tujuh Sakramen tidak bisa diganggu gugat selain dengan persetujuan dari Paus. Maka dari itu untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine of Aragon, Raja Henry VIII harus mendapatkan persetujuan dari Paus Klemens VII. Yang kedua, "the peculiar situation in international affairs" (Lucas, 1960, Hlm. 549). Poin yang kedua ini bermula pada saat Paus Klemens VII bergabung dengan Liga Cognac bersama dengan Perancis, Florence, Milan dan Venesia dengan harapan dapat memukul mundur Spanyol dari Italy dan menghetikan kekuasaan Kaisar Charles V di peninsula. Sayangnya, ketika Raja Henry VIII mengajukan permohonan pada Paus Klemens VII, pasukan Kaisar Charles V dan pasukan Jerman telah mengepung Roma. Insiden ini dikenal dengan sebutan Sacked of Rome (1527 M). Karena hal inilah Paus Klemens VII menolak permintaan Raja Henry VIII. Ia pun mengirimkan Kardinal Campeggio ke Inggris untuk mengulur waktu.

Raja Henry VIII yang merasa semakin terusik dengan keputusan Paus Klemens VII, Anne Boleyn yang menolak dijadikan selir dan permaisurinya yang keras kepala kemudian melampiaskan amarahnya pada Kardinal Wolsey. Ia menuduh Wolsey

telah melakukan pelanggaran pada Statute of Praemunire. "Wolsey had done his very utmost for his master, but he had failed, and his doom was pronounced.....cardinal was abject in his submission, although his act had been done in the King's service" (Clark, 1897, hlm 75).

Pada tanggal 19 Agustus 1529, hari dimana Kardinal Wolsey dicabut jabatannya sebagai Lord Chancellor, surat perintah untuk membentuk parlemen baru dikeluarkan. Parlemen ini terbilang sangat aktif bila dibandingkan parlemen-parlemen yang pernah dibentuk sebelumnya. Hal ini terlihat dari banyaknya undang-undang yang dikeluarkan meskipun parlemen ini hanya bertahan selama 7 tahun.

The body that met was unprecedented: it lasted seven years, enacted 137 statutes, of which 32 were of vital national significance, and exercised an influence in the affairs of God and church that no feudal parliament had ever dreamed of claiming (Smith, 1988, hlm 111).

Parlemen ini merupakan parlemen anti kepausan, yang hanya melaksanakan kehendak dari kerajaan. Parlemen ini juga termasuk parlemen yang paling aktif dan efektif dalam sejarah konstitusi Kerajaan Inggris apabila dibandingkan dengan parlemen-parlemen yang ada sebelumnya.

Pada titik ini dapat terlihat bagaimana Raja Henry VIII, sebagai seorang raja tidak dapat melakukan secara nyata keputusannya sendiri, di atas tahtanya sendiri. Pengalaman pribadi ini menyadarkannya bahwa kepentingan Inggris dapat dipertahankan oleh negara-negara lain melalui kekuasaan paus (Samekto, 1998, hlm 105). Raja Henry VIII memanfaatkan otoritas dalam posisinya sebagai seorang pemimpin kerajaan

untuk memaksa para rohaniawan untuk membantunya melayangkan petisi pada Paus.

They were all force to complain of the strange usage of this King who both by his authority and with his pen had supported the Apolistic See and was now denied justice. If the Pope still refuse [to annul the marriage] they would conclude that he had abandoned them and so seek for another remedies (Slessor, 1952, hlm 23).

Meskipun begitu, pada tahap ini Raja Henry VIII belum mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari Gereja Roma. "There was no real thought of risking a permanent break with Rome" (Smith, 1988, hlm 111).

Pada tahap ini, seorang rohaniawan, Thomas Cranmer pun muncul dihadapan Raja Henry VIII dengan memberikan pendapat bahwa, pernikahan antara Raja Henry VIII dan Catherine of Aragon dapat dibatalkan tanpa keterangan kepada Paus (Poesponegoro, 1984, hlm 80). Ia juga dibantu oleh Thomas Cromwell, negarawan yang merupakan mantan sekretaris dari Thomas Wolsey yang kelak menjadi sekretaris Raja Henry VIII menggantikan tuannya. Ditambahkan oleh Clark (1897, hlm 76) Cranmer berpendapat bahwa, "they should obtain the opinions of the Universities of Europe, and act upon them by holding a court in England". Meskipun tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan dan dapat melegitimasi keputusannya, Raja Henry VIII akhirnya mendapatkan jawaban dari universitas-universitas tersebut. "To marry a deceased brother's wife, when the matrimony had actually been consummated, was against the divine law" (Clark, 1897, hlm 76). Jawaban ini tidak cukup kuat untuk melegitimasi

keputusan Raja Henry VIII. Tetapi, sangat kuat dijadikan alasan untuk pembuktian bahwa dispensasi kepausan yang diberikan oleh Paus Julius II pada pernikahan antara Raja Henry VIII dan Catherine of Aragon merupakan hal yang menyalahi hukum. Akan tetapi Paus Klemens VII tidak goyah pada pendiriannya. Raja Henry VIII memberlakukan kembali hukum Praemunire atau Statute of Praemunire pada tahun 1530. Raja Henry VIII mendeklarasikan bahwa siapapun yang melakukan aktifitas apapun dengan hal yang berhubungan dengan Kepausan, maka hukumannya adalah penjara.

Raja Henry VIII dengan bantuan Thomas Cromwell mengeluarkan sejumlah undang-undang yang ditujukan untuk melumpuhkan otoritas gereja di Kerajaan Inggris. Sejumlah undang-undang dikeluarkan untuk menyerang gereja dan kepausan pada pusatnya, yaitu sumber keuangan, diantaranya:

1. Mortuaries Act dan Probate Act. Kedua undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1530 untuk menutup penghasilan para rohaniawan dari pelayanan pemakaman umat
2. Mortmain Act. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1532 dan bersangkutan dengan larangan hak kepemilikan bagi para kaum rohaniawan.
3. Statutes of Annates, atau juga dikenal dengan First Fruits. Parlemen memberikan otoritas pada raja untuk menghentikan pembayaran pada paus dari penghasilan tahun pertama dari semua uskup yang baru diangkat, yang kemudian dibayarkan pada pihak kerajaan. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1532.

4. The Appointment of Bishop Act. Bertujuan untuk memangkas habis pembayaran pada pihak Gereja Roma atau Kepausan agar biaya pembayaran tersebut dapat masuk ke dalam kas negara. Undang-undang ini keluar pada tahun 1533.

Selain itu terdapat sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan melumpuhkan otoritas gereja di kerajaan, diantaranya:

1. Supplication Against Ordinaries. 'Ordinaries' yang dimaksud ialah para biarawanyangdirasamenyalahgunakan otoritas gereja dengan berbagai tindakan yang tercela Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1532.
2. Submission of the Clergy. Undang-undang ini dikeluarkan oleh parlemen pada bulan Mei 1532. Dalam undang-undang ini, hukum gereja hanya dapat dibuat atas seizin raja.
3. The Act in Restraint of Appeals. Dikeluarkan pada bulan April 1533. Dikeluarkannya undang-undang yang membahas mengenai aturan keagamaan yang setiap keputusannya merupakan otoritas dari raja, bukan dari yang lainnya, maka Raja Henry VIII bebas melakukan setiap keputusan yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk pernikahan, tanpa restu dari pihak lain (dalam hal ini merupakan restu dari paus)
4. The Act of Supremacy. Dikeluarkan pada tahun 1534. Merupakan Kepala Tertinggi dari Gereja Inggris dan Kerajaan Inggris. Dimulai sejak diberlakukannya The Act of Supremacy, Paus tidak berkuasa lagi atas Gereja Inggris, ia hanya diakui sebagai uskup Roma saja.

Undang-undang inilah yang mengakhiri sepenuhnya hubungan Kerajaan Inggris dengan Gereja Roma.

Dengan dikeluarkannya sejumlah undang-undang ini merupakan usaha Raja Henry VIII dalam mengguguli otoritas Gereja Roma di kerajaannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh Raja Henry VIII yang merasa otoritasnya masih kurang bila dibandingkan dengan otoritas Gereja Roma untuk mengambil keputusan yang bersangkutan dengan keberlangsungan kekuasaan Dinasti Tudor. Gesekan atau konflik antara kedua otoritas ini diakhiri dengan kemenangan Raja Henry VIII dalam mengguguli otoritas Gereja Roma di atas tanahnya sendiri.

Selain itu Raja Henry VIII membentuk Gereja Nasional Anglikan. Gereja Inggris atau Gereja Anglikan, apabila disesuaikan dengan pemisahan diri dari Gereja Roma secara gerejawi, menurut hukum terbentuk pada bulan November 1534. Pemberian nama Anglikan itu sendiri diambil dari sebuah prase dalam Magna Carta yang dibuat oleh Raja John. Ecclesia Anglicana, yang memiliki arti Gereja Inggris.

Tujuan utama pemisahan Gereja Inggris dari Gereja Roma ialah agar Raja Henry VIII mendapatkan legitimasi untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine of Aragon dan bisa menikahi Anne Boleyn agar mendapatkan seorang putera sebagai pewaris tahta. Keluarnya undang-undang The Act Of Supremacy yang menyatakan Raja Henry VIII sebagai Supreme Head of The Church of England, juga menjadikan Raja Henry VIII sebagai Kepala Gereja Inggris menggantikan paus. Paus pun hanya dianggap sebagai Uskup Roma saja. Sehingga segala bentuk aturan ataupun pertemuan kegerejaan harus

mendapatkan izin darinya. Seperti yang disebutkan dalam The Act of Supremacy, bahwa ".....The King, our Sovereign Lord, his heirs, and successors, kings of this realm, shall be taken, accepted, and reputed the only supreme head in earth of the Church of England called Anglicana Ecclesia" (Child, 1890, Hlm. 76). Hal ini menjadikan Gereja Inggris sebagai Gereja Nasional. Meskipun begitu, pada masa fase awal pembentukan Gereja Inggris yang dikepalai oleh Raja Henry VIII, doktrin Anglikanisme belum semapan pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Raja Henry VIII menganggap bahwa Gereja Inggris merupakan bagian dari Gereja Katolik dan tidak akan merubah doktrin dan ritual yang biasa dilakukan di dalam gereja. Child (1890, hlm 47-48) menyatakan bahwa, "change of doctrine followed as consequence, partly of the separation itself". Hal ini menyebabkan bentuk awal dari doktrin Anglikanisme tidak memiliki banyak perbedaan dengan doktrin Katolik Roma. Namun seiring berjalannya waktu, juga dipengaruhi oleh kepemimpinan raja dan para ratu serta serangkaian peristiwa, selanjutnya bentuk dari doktrin Anglikanisme ini disesuaikan sesuai dengan keputusan para pemimpin tersebut. meskipun begitu, terdapat beberapa kelompok masyarakat dalam gereja Anglikan yang menjalankan beberapa praktik keagamaan yang juga ada dalam ajaran Protestan. Brinton dkk. (1960, Hlm. 493) menyatakan bahwa, ".....the new Church of England to introduce such Protestant practices as marriage of the clergy, use the English instead of Latin in the ritual, abolition of auricular confession, abolition of the invocation of saints".

Terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh Reformasi Gereja di Inggris tahun 1534. Dengan dideklarasikannya

The Act of Supremacy tahun 1534, menandai berpisahya Kerajaan Inggris dengan Gereja Roma. Raja Henry VIII pun menjadi Kepala Gereja dan Kepala Kerajaan Inggris secara bersamaan. Lepasnya Kerajaan Inggris dari otoritas Gereja Roma, maka Kerajaan Inggris pun menjadi negara dengan kedaulatan yang utuh tanpa interupsi dan campur tangan otoritas lain yang cenderung absolut. Dalam proses pemisahan Kerajaan Inggris dari Gereja Roma, pihak parlemen telah mengeluarkan sejumlah undang-undang yang melumpuhkan pihak rohaniawan serta tunduk pada otoritas kerajaan. Selain itu, terbentuk pula Gereja Anglikan degan dikepalai oleh Raja Henry VIII. Meskipun memisahkan diri dari Gereja Roma, karena pada dasarnya Raja Henry VIII merupakan seorang Katolik yang taat, maka Raja Henry VIII bersikukuh bahwa, doktrin dari Gereja Anglikan merupakan bagian dari Gereja Roma. Keputusan Raja Henry VIII dalam memisahkan diri dari Gereja Roma pada tahun 1534, merupakan awal dari permasalahan keagamaan disepanjang kekuasaan Dinasti Tudor di Kerajaan Inggris. Pada masa pemerintahan Raja Edward IV, pertumbuhan Protestan sangatlah pesat dan tidak bisa dikendalikan. Hal ini bertolak belakang pada masa pemerintahan Ratu Mary I yang mencoba untuk mengembalikan keyakinan Kerajaan Kristen pada Katolik. Ia berusaha membersihkan Kerajaan dari kaum Protestan. Permasalahan keagamaan ini memuncak pada masa Pemerintahan Ratu Elizabeth I. Beruntung, ratu yang merupakan pemimpin terbesar Dinasti Tudor tersebut, mampu menghentikan permasalahan keagamaan yang disebabkan oleh keputusan ayahnya tersebut.

SIMPULAN

Abad ke 16 merupakan waktu yang krusial dimana banyak sekali paham yang muncul. Paham-paham tersebut menjadi landasan dimana bentuk negara modern bermunculan di Eropa. Salah satu contoh yang tepat dari fenomena yang terjadi di Eropa pada abad ke 16 ialah Kerajaan Inggris. Reformasi Gereja di Inggris pada tahun 1529-1534 merupakan salah satu dari rangkaian Reformasi Gereja yang melanda Eropa pada abad ke 16. Akan tetapi, Reformasi Gereja di Inggris tidak bersifat doktrinal seperti reformasi Gereja di negara lain. selain itu salah satu dampak reformasi ini ialah kedaulatan penuh yang didapatkan oleh Kerajaan Inggris. Setelah Kerajaan Inggris melepaskan diri dari otoritas Gereja Roma, maka pemerintahan Kerajaan Inggris selanjutnya tidak mendapatkan intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, maka kedaulatan penuh pun didapatkan oleh Kerajaan Inggris.

Apabila dilihat dari proses pelepasan diri Kerajaan Inggris dari otoritas Gereja Roma, dapat dilihat bahwa Raja Henry VIII memerankan perannya sebagai raja atau pemimpin sebuah pemerintahan dengan penuh. Ia berusaha memenangkan persaingan otoritas dengan Gereja Roma di tanahnya sendiri, hingga akhirnya ia memenangkan persaingan tersebut. Raja Henry VIII sebelumnya berada didalam sebuah masalah yang menjebaknyanya antara posisinya sebagai kepala pemerintahan dan sebagai seorang Katolik yang taat pada Gereja dan Paus. Akan tetapi ambisinya untuk melanjutkan dan memelihara kekuasaan dinastinya lebih besar daripada kepatuhannya pada Paus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Brinton, Christopher & Wolff. 1960. *A History of Civilization: Volume One: to 1715*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Child, Gilbert W. 1890. *Church and State Under The Tudors*. London: Longmans, Green & Co.
- Clark, William. 1897. *Ten Epoch of Church History (Vol X): The Anglican Reformation*. New York: The Christian Literature Co.
- Gottschalk, Louis. 2015. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hall, Walter P, Robert G. Albion & Jennie B. Pope. 1961. *A History of England and the Empire-Commonwealth (Fourth Ed)*. Boston: Ginn and Company.
- Lensch, Christopher K. 1996. *The Morningstar of The Reformation: John Wycliffe*. *Western Reform Seminary Journal*, Vol 03, No 2, hlm 16-22.
- Lewis, Brenda Ralph. 2015. *Sejarah Gelap Raja & Ratu Inggris*. Jakarta: PT Elex Media Komputering.
- Lucas, Henry S. 1960. *The Renaissance and The Reformation (second ed)*. New York: Harper & Row.
- Lucas, Henry S. 1993. *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Lyon, Bryce, Herbert H. Rowen & Theodore S. Hamerow. 1972. *A History of The Western World (Volume I): Prehistory Through Renaissance*. Illinois: Rand McNally & Company.
- Minogue, Kenneth. 2006. *Sekilas Tentang Politik*. Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Okon, Etim. N. 2013. *The Causation of Protestant Reformation: Lesson of History*. *Journal of Humanities and Social Science*, Vol 10, No. 2, hlm 11-20.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 1984. *Tokoh dan Peristiwa Dalam Sejarah Eropa Awal Masehi – 1815*. Jakarta: UI-Press.
- Sabine, George H. 1954. *Teori-Teori Politik I: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Bandung: Dhiwantara.
- Samekto. 1998. *Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris*. Jakarta: Daya Widya & Garasindo.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Slessor, Henry. 1952. *Anglican Dilemma*. London: Hutchinson & Co.
- Smith, Lacey Baldwin. 1988. *This Realm of England: 1399 to 1688*. Canada: D.C Heath and Company.
- Suhelmi, Ahmad. 2004. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.